

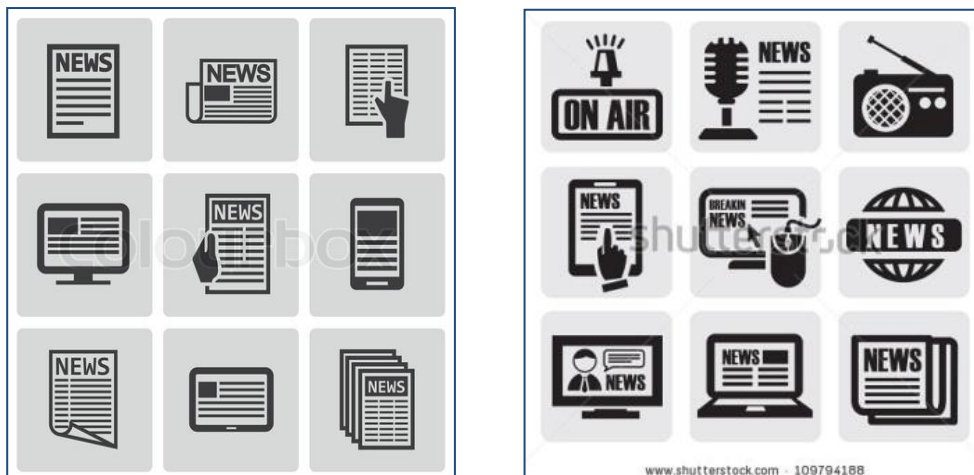


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

**Ekonomi**

**Senin, 18 Maret 2019**



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2019**

## **Daftar Isi**

1. INDUSTRI DIPACU EKSPOR (*Media Online Kompas*)
2. TERTATIH UBAH KEADAAN (*Media Online Kompas*)
3. FAKTOR EKSTERNAL TEKAN INDUSTRI (*Media Online Republika*)
4. INVESTOR MASIH TUNGGU HASIL PEMILU (*Media Online Republika*)

# KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Senin

18 Maret 2019

## Industri Dipacu Ekspor

Kelebihan kapasitas bisa dimanfaatkan guna menghasilkan produk ekspor. Selain itu, industri berbahan baku dominan lokal akan memberikan nilai tambah jika produknya diekspor.

**JAKARTA, KOMPAS** — Industri yang memiliki kelebihan kapasitas dan berbahan baku dominan lokal bisa dipacu untuk meningkatkan ekspor. Langkah ini mempertimbangkan ekspor sebagai solusi bagi industri untuk mengoptimalkan kapasitas terpasang.

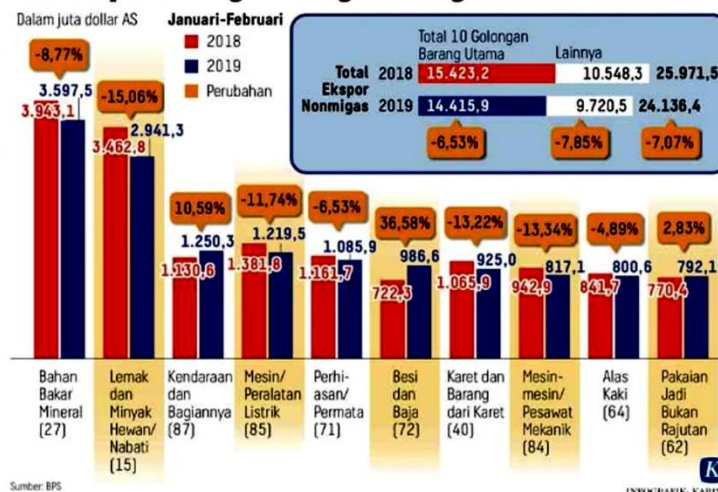
Industri di Indonesia yang kapasitasnya berlebih antara lain industri keramik dan otomotif. Industri berbahan baku dominan lokal yang juga berpotensi didongkrak ekspornya adalah industri mebel dan kerajinan.

"Kapasitas terpasang industri keramik saat ini 580 juta meter persegi," kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto di sela-sela pameran Keramik 2019. Pameran di Jakarta Convention Center itu berlangsung Kamis (14/3/2019) hingga Minggu (17/3).

Edy menambahkan, kapasitas terpasang sebesar itu membuat industri keramik Indonesia di posisi keempat dunia setelah China, India, dan Brasil. Namun, produksi industri keramik nasional masih di bawah kapasitas terpasang tersebut.

Terkait arahan Presiden Joko Widodo agar pelaku industri dapat menggenjot ekspor dan mengurangi impor, Edy mengatakan, Asaki meminta dukungan penyediaan harga gas yang berdaya saing.

### Nilai Ekspor Nonmigas Golongan Barang Utama



"Dengan demikian, industri keramik dalam negeri dapat memanfaatkan pasar ekspor, khususnya di kawasan Asia Tenggara," kata Edy.

Asaki menilai, penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi menyeluruh Indonesia-Australia juga akan membuka pasar baru bagi industri keramik Indonesia. Pemanfaatan potensi itu diharapkan me-

ningkatkan produksi industri keramik Indonesia menjadi 420 juta-440 juta meter persegi dari sebelumnya yang hanya 370 juta-380 juta meter persegi.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian (Kemperin), industri keramik Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki keunggulan kompetitif berupa pasokan bahan baku dari dalam ne-

geri. Bahan baku itu antara lain tanah liat, sejumlah mineral, pasir silika, dolomit, dan batu kapur.

### Solusi

Menperin Airlangga Hartarto mendorong industri, terutama yang memiliki kelebihan kapasitas, untuk meningkatkan ekspor. Menurut dia, ekspor merupakan solusi jangka pendek pa-

da saat industri kapasitas besar, tetapi utilisasi domestik masih rendah.

Sektor yang juga mempunyai bahan baku lokal berupa rotan, kayu, dan bambu adalah industri mebel dan kerajinan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Kemperin, Indonesia adalah penghasil 80 persen bahan baku rotan dunia yang tersebar, antara lain, di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto menyampaikan, ekspor mebel Indonesia ditargetkan 5 miliar dollar AS per tahun.

Nilai ekspor mebel Indonesia pada 2016 sebesar 1,6 miliar dollar AS. Nilai ekspor meningkat menjadi 1,63 miliar dollar AS pada 2017 dan 1,69 miliar dollar AS pada 2018.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Soegarto menuturkan, kapasitas industri mobil di Indonesia sekitar 2.250.000 unit, tetapi baru terpakai untuk memproduksi 1,4 juta unit. Sekitar 1,1 juta mobil yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, sedangkan selebihnya diekspor.

Salah satu tantangan meningkatkan ekspor otomotif adalah jenis kendaraan yang diproduksi di Indonesia. (CAS)

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan ekspor oleh industri yang memiliki kelebihan kapasitas. Lima sektor industri yang diprioritaskan dalam penerapan revolusi industri keempat atau Industri 4.0 diharapkan dapat ikut memacu tambahan ekspor.

Hashtag Berita :

#NeracaPerdagangan #PertumbuhanEkonomiNasional #DuniaUsaha #EksporImport  
 #StabilitasEkonomiIndonesia #PelaksanaanProgramNasional #ProdukDomestikBruto  
 #Perindustrian

## NERACA PERDAGANGAN

### Tertatih Ubah Keadaan

**N**eraca perdagangan Indonesia pada Februari 2019 memang surplus. Namun, ada dua catatan terhadap surplus itu. Pertama, surplus terjadi karena impor turun, bukan lantaran kenaikan ekspor. Kedua, surplus tipis itu belum mampu mengompensasi defisit Januari 2019 sehingga neraca Januari-Februari 2019 masih defisit.

Ekspor dan impor saling terkait erat. Penurunan ekspor terjadi karena permintaan global melemah, efek perang dagang, dan hambatan dagang sejumlah negara. Penurunan ekspor berimbas pada pelambatan kinerja industri yang berbasis ekspor.

Badan Pusat Statistik mencatat, neraca dagang pada Februari 2019 surplus 329,5 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 4,715 triliun. Nilai ekspor dan impor bulan itu masing-masing 12,53 miliar dollar AS dan 12,2 miliar dollar AS. Adapun neraca perdagangan akumulatif Januari-Februari 2019 defisit 0,73 miliar dollar AS.

Efek perang dagang AS-China yang tak kunjung usai mulai berpengaruh terhadap ekspor nasional. Ekspor Indonesia ke AS pada Februari 2019 turun 15,79 persen dibandingkan dengan Januari 2019. Produk ekspor yang terbesar penurunannya adalah lemak serta minyak nabati dan hewani, karet, tekstil, juga alat mesin.

Begitu juga ekspor ke China, turun 11,07 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Komoditas ekspor yang merosot terutama bahan bakar mineral, lemak serta minyak nabati dan hewani, bahan kimia organik, juga alas kaki.

Ekspor komoditas utama Indonesia, terutama minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, juga makin terimpit kebijakan India dan Uni Eropa (UE). India menaikkan bea masuk CPO dan produk turunan Indonesia dua kali lipat dari tarif awal. Secara tahunan angka eks-



pornya menurun 23,49 persen dan bulanan 13,22 persen.

Sementara itu, UE makin tegas mengukuhkan kebijakan energi terbarukan. UE mengeluarkan sawit dari daftar sumber energi terbarukan. Secara umum, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara UE pada Januari-Februari 2019 turun 9,63 persen. Pada periode sama, khusus ekspor CPO turun 15,06 persen.

Sejumlah kalangan menilai kondisi neraca

perdagangan itu menunjukkan kalau Indonesia terimpit gelombang ekonomi global dan stagnasi industri domestik. Jika pelambatan terus berlanjut, kemampuan Indonesia membayar utang luar negeri akan terpengaruh.

Bank Indonesia menunjukkan, rasio pembayaran DSR (*debt service ratio*) Tier-1 pada 2018 sebesar 24,08 persen atau turun dibandingkan dengan 2017 yang 25,54 persen. DSR ini sedikit di bawah batas aman Debt Services Framework Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang sebesar 25 persen.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam kendati tertatih membalikkan keadaan neraca. Sejumlah kementerian telah berupaya memperbaiki kinerja neraca melalui pengendalian impor, insentif perpajakan, dan memanfaatkan e-dagang.

Kementerian Perdagangan sendiri pada tahun ini menargetkan ekspor nonmigas tumbuh 7,5 persen atau 175 miliar dollar AS. Hal itu mengingat target ekspor nonmigas tahun lalu yang 11 persen hanya terealisasi 162,8 miliar dollar AS atau 6,7 persen.

Strategi peningkatan ekspor lebih kurang masih sama, antara lain membuka pasar baru dan menuntaskan perjanjian-perjanjian perdagangan. Pendekatan bilateral dengan negara dan kawasan penghambat, seperti India dan UE, juga makin intensif. Salah satu hasilnya, India akan menurunkan bea masuk produk turunan CPO asal Indonesia dari 50 persen menjadi 45 persen.

Meski tertatih membalikkan neraca perdagangan, langkah-langkah itu tetap perlu terus dilakukan di tengah keriuhan tahun politik. (HENDRIYO WIDI)

## TERTATIH UBAH KEADAAN

**Neraca Perdagangan Indonesia pada Februari 2019 memang surplus. Namun ada dua catatan terhadap surplus itu. Pertama, surplus terjadi karena impor turun, bukan lantaran kenaikan ekspor. Kedua, surplus tipis yang belum mampu mengkompensasi defisit pada Januari 2019, jadi alokasi perdagangan Januari-Februari 2019 masih defisit. Terkait, ekspor dan kepentingan saling terkait erat. Penurunan ekspor yang terjadi karena permintaan global yang menurun, efek perang dagang, dan perdagangan yang merugikan negara. Penurunan ekspor itu berimbas pada pelambatan kinerja industri, terutama yang berbasis ekspor.**

Hashtag Berita :

#NeracaPerdagangan #EksporImport  
 #ProdukDomestikBruto #Perindustrian  
 #PertumbuhanEkonomiNasional  
 #DuniaUsaha #StabilitasEkonomiIndonesia  
 #PelaksanaanProgramNasional

# REPUBLIKA

SENIN, 18 MARET 2019

## Faktor Eksternal Tekan Industri

● ADINDA PRYANKA

### IISIA mengapresiasi penurunan impor besi dan baja.

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, menilai kinerja perdagangan Indonesia mulai merasakan dampak perlambatan ekonomi dunia. Pasalnya, kinerja ekspor dan impor pada Februari 2019 mengalami penurunan, baik secara bulanan maupun tahunan.

"Perlambatan ekspor dan lemahnya konsumsi impor barang produksi Indonesia sebetulnya lebih merupakan *trickledown effect* (efek menetes ke bawah) dari perlambatan ekonomi dunia terhadap kinerja produksi dan ekspor kita," kata Shinta ketika dihubungi *Republika*, Ahad (17/3).

Dia mengatakan, industri manufaktur Indonesia saat ini sedang sulit meningkatkan produksi. Penyebabnya adalah penurunan daya beli dari pasar internasional akibat perang dagang antara AS dan Cina.

Menurut Shinta, perang dagang bahkan sudah menyebabkan perlambatan industri manufaktur Cina. Hal tersebut kemudian memberikan pengaruh terhadap ekspor produk nonmigas di seluruh dunia. Fenomena tersebut sudah terindikasi sejak Januari 2019 berdasarkan survei Caixin

Purchasing Manager's Index (PMI).

Selain itu, Shinta menambahkan, beberapa negara di Eropa juga sedang mengalami perlambatan permintaan. Dengan kondisi tersebut, Shinta menyampaikan, pelaku usaha internasional tidak berani mengambil komitmen terhadap aktivitas produksi yang berskala besar maupun berkomitmen panjang atau berada dalam situasi *wait and see*.

Faktor lain yang menyebabkan kinerja perdagangan Indonesia lesu, menurut Shinta, adalah Indonesia tidak bisa memanfaatkan potensi pasar yang tercipta di AS sejak perang dagang. Hal tersebut turut dipengaruhi kondisi manufaktur Indonesia yang tidak mampu memproduksi barang untuk substitusi produk Cina.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan ekspansi ekspor ke pasar nontradisional. Meski begitu, dia juga mengakui hal itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena itu, dia meminta pemerintah untuk membantu pengusaha dalam penetrasi ke pasar-pasar baru tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor mengalami penurunan mencapai 10,03 persen (*month to month/mtm*), yakni dari 13,97 miliar dolar AS pada Januari 2019 menjadi 12,53 miliar dolar AS pada bulan lalu. Angka ekspor Februari 2019 juga mengalami penurunan sebesar 11,3 persen jika dibandingkan dengan ekspor Februari tahun lalu (*year on year/yoY*). Impor Februari 2019 yang mencapai 12,20 miliar dolar AS juga turun 18,61

persen (*mtm*) dan 13,98 persen (*yoY*). Secara lebih terperinci, impor bahan baku pada Februari 2019 turun 15,04 persen (*yoY*) menjadi 9,01 miliar dolar AS. Begitu pula impor barang modal turun 0,8 persen (*yoY*) menjadi 2,19 miliar dolar AS.

Senada dengan Shinta, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmi) Adhi S Lukman menjelaskan, impor untuk kebutuhan industri turut disebabkan faktor eksternal. Adhi menyampaikan, tahun lalu investasi asing untuk sektor makanan dan minuman di Indonesia turun hingga tujuh persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi itu diprediksi kembali terjadi pada tahun ini, seiring dengan situasi Indonesia yang menghadapi tahun politik.

Namun, Adhi menilai industri makanan dan minuman masih memiliki momentum pada tahun ini. Hal itu didorong oleh faktor domestik seperti peningkatan permintaan menjelang puasa dan Lebaran. Dia pun memprediksi tingkat impor akan kembali meningkat.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim justru mengapresiasi kebijakan pemerintah yang berhasil menekan impor besi dan baja ke Indonesia. Dengan kebijakan itu, dia optimistis kinerja industri lokal dapat berjalan makin maksimal. "Termasuk tekanan terhadap neraca perdagangan juga semakin kecil," kata dia.

■ **ed:** ahmad fikri noor

Faktor domestik lainnya yakni belanja pemerintah tumbuh 2,14 persen dinilai tidak maksimal karena masih jauh di bawah pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Menurut Faisal, hal ini yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai target yang sebesar 5,2 persen meski terjadi perbaikan ekonomi global. Sebagai perbandingan, negara tetangga di kawasan Asia Tenggara mampu tumbuh di atas ekonomi Indonesia.

Hashtag Berita :

#BadanPusatStatistik #PertumbuhanEkonomiNasional #StabilitasEkonomiIndonesia  
 #EkonomiGlobal #PelaksanaanProgramNasional #ProdukDomestikBruto #KebijakanFiskal  
 #EksporImpor #Perindustrian

# REPUBLIKA

SENIN, 18 MARET 2019

## Investor Masih Tunggu Hasil Pemilu

JAKARTA – Ekonom lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai investor masih akan menunggu hasil pemilihan umum (pemilu) sebelum memutuskan berinvestasi di Indonesia. Meski lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating memberikan predikat "layak investasi" kepada Indonesia, menurut Andry, hal itu hanya akan berpengaruh pada investasi portofolio. Sementara itu, dampak terhadap investasi langsung belum akan terasa.

"Pengaruh Fitch Rating lebih besar ke portofolio daripada ke sektor riil. Saya lihat untuk berinvestasi di sektor riil, investor masih *wait and see*," kata Andry ketika dihubungi *Republika*, Ahad (17/3).

Untuk diketahui, Fitch Rating mengkonfirmasi peringkat utang Pemerintah Indonesia di level BBB dengan proyeksi stabil.

Andry menilai penilaian itu diberikan karena belum adanya lonjakan drastis utang negara. Selain itu, tidak ada risiko eksternal yang mengancam Indonesia sehingga memicu pembengkakan utang lebih dalam.

Meski begitu, menurut Andry, laporan dari Fitch dapat meredakan sentimen negatif yang bisa memicu arus modal keluar atau *capital outflow*. Ia mencatat porsi kepemilikan asing pada surat berharga negara (SBN) Pemerintah Indonesia sebesar 37 persen. Itu sebabnya arus modal keluar dapat menimbulkan gejolak pada sektor keuangan Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kepercayaan investor terhadap situasi ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa makin positif. Hal itu terutama setelah Indonesia kembali mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional.

"Kita berharap terus investasi akan terus naik," kata Sri di kantor Kementerian

Keuangan, akhir pekan lalu.

Menurut Sri, opini stabil terhadap Indonesia dari Fitch memberikan dampak positif. Pasalnya, mempertahankan predikat stabil di tengah gejolak ekonomi global sedang tidak mudah. Dia menilai saat ini sejumlah negara yang sederajat dengan Indonesia tengah mengalami tantangan perekonomian akibat penurunan pertumbuhan dan melebarnya defisit anggaran.

Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinyatakan sebesar 5,17 persen. Sri menilai laju pertumbuhan itu terbesar sejak 2014. Selain itu, defisit APBN terus mengecil sehingga Indonesia masih dapat dikategorikan dalam kelompok negara yang baik.

"Selama 2018 terjadi gejolak nilai tukar, suku bunga, tapi Indonesia masih dianggap sebagai negara yang mengadopsi kebijakan responsif dan pragmatis," ujar Sri.

Tahun ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi sektor riil dari asing maupun domestik sebesar Rp 792 triliun atau tumbuh 7 persen dari pencapaian 2018. Tahun lalu, BKPM mencatat total investasi yang masuk mencapai Rp 721,3 triliun, naik 4,1 persen dibanding 2017. Mengacu pada target investasi dalam RPJMN, investasi tahun 2018 tercapai 94,3 persen.

Sementara itu, situasi transaksi di Bursa Efek Indonesia dalam sebulan terakhir dikuasai oleh investor domestik. Tercatat, total nilai perdagangan saham mencapai Rp 189,9 triliun. Sebanyak 65,51 persen dilakukan oleh investor domestik, sedangkan 34,49 persen sisanya oleh investor asing.

Pembelian saham oleh investor domestik sebesar Rp 125 triliun dan penjualan mencapai Rp 123 triliun. Sementara itu, pembelian saham oleh investor asing hanya Rp 64,8 triliun dan penjualan sebesar Rp 66,2 triliun.

■ dedy darmawan nasution edis ahmad fikri noor

”  
**Selama 2018 terjadi gejolak tapi Indonesia masih dianggap responsif.**

**Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan meyakinkan para investor untuk datang dan berinvestasi di Tanah Air. Serta memberikan sentimen positif para investor dan para penggiat ekonomi dunia terhadap kondisi ekonomi Indonesia di tengah isu perang dagang AS-China, politik dalam negeri (pemilu) serta fluktuasi harga minyak dunia yang mempengaruhi nilai tukar rupiah, ekonomi digital dan gaya hidup, industri 4.0 oleh Indonesia.**

Hashtag Berita :

#NeracaPerdagangan #PertumbuhanEkonomiNasional #DuniaUsaha #EksporImport  
#StabilitasEkonomiIndonesia #PelaksanaanProgramNasional #ProdukDomestikBruto  
#Perindustrian